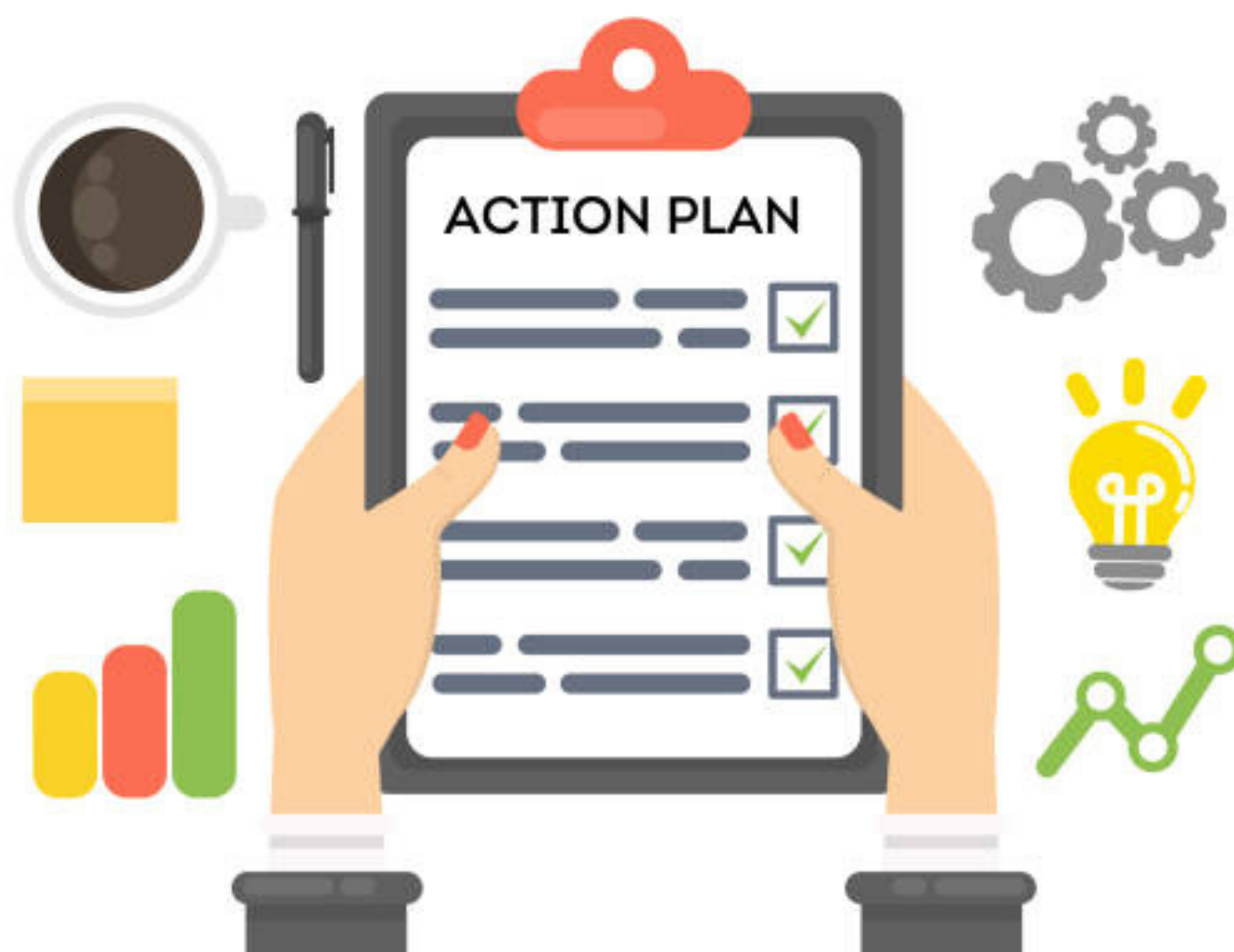




PERUBAHAN RENCANA AKSI

TAHUN 2024



BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

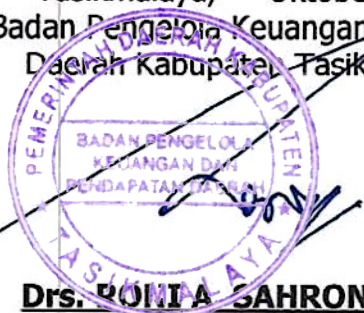
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dapat tersusun tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan Rencana Aksi Kinerja disusun dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Edaran Nomor: 0023 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024. Sehingga, Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian khususnya dalam pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Honorarium. Hal tersebut sebagai bentuk dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023. Kemudian perubahan alokasi anggaran dan target indikator kinerja menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Aksi Kinerja ini.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Aksi Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

Tasikmalaya, Oktober 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. ROLIA SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Maksud dan Tujuan 4

1.3 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 5

2.1 Perubahan Rencana Kerja (RENJA)..... 5

2.2 Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 5

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan 9

BAB III PERUBAHAN RENCANA AKSI.....12

BAB IV PENUTUP22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama Triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Edaran Nomor: 0023 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024. Sehingga, Perangkat Daerah harus melakukan penyesuaian dalam pengelolaan belanja modal dan belanja honorarium;
2. Terdapat perubahan target indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 nilai RB BPKPD jauh melampaui target yang telah ditetapkan dan telah mencapai sebesar 78,07. Capaian tersebut juga telah melampaui target pada tahun 2024, maka BPKPD pada tahun 2024 – 2026 harus menetapkan target diatas capaian tahun 2023;
3. Penambahan atau pengurangan target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan, serta penambahan/pengurangan dan pergeseran pagu anggaran sub kegiatan;
4. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran BPKPD Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Perubahan rencana aksi kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya TA 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2024. Perubahan rencana aksi BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen perubahan rencana aksi kinerja sasaran BPKPD Kab. Tasikmalaya adalah sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan dokumen perubahan rencana aksi kinerja sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2024 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran startegis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mempermudah dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan doumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
Bab II Perubahan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja	Menyajikan mengenai Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Bab III Perubahan Rencana Aksi	Menyajikan Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Bab IV Penutup	Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan perubahan rencana aksi.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Kerja (RENJA)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur penunjang pengelola keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN
TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN
SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima”**. BPKPD memiliki tugas yang strategis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati, untuk menunjang tujuan strategis tersebut maka disusunlah sasaran strategis agar tujuan tersebut tercapai.

2.2 Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai dengan periode Renstra yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor RC.10.06/ Kep.82/ BPKPD/ 2023

tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR.10.06/ Kep.60/ BPKPD/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.

Perubahan rencana aksi juga memuat perubahan target Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada sasaran Nilai Informasi Birokrasi. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 nilai RB BPKPD jauh melampaui target yang telah ditetapkan dan telah mencapai sebesar 78,07. Capaian tersebut juga telah melampaui target pada tahun 2024, maka BPKPD pada tahun 2024 – 2026 harus menetapkan target diatas capaian tahun 2023. Adapun Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perubahan Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	59,06	66,489	67,50	78,019	79,00	80,00	81,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	65	69	78,25	78,50	79
											Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

											Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77	80	83	86	89	90
											Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30

Sumber: Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78,25
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
3.	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	86%
4.	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	5,18%

Tabel 2.3

Perubahan Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		30.242.098.246,00
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.000.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.836.075.321,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.340.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.331.716.225,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	914.731.400,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.690.670.500,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.752.654.800,00
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		701.974.550.548,00
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.415.072.000,00
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	492.461.000,00
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	745.500.000,00

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	698.321.517.548,00
3.	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	86%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	956.852.100,00
4.	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	5,18%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.525.061.000,00

Sumber: BPKPD 2024, diolah

BAB III PERUBAHAN RENCANA AKSI

Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala. Adapun perubahan rencana aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGE T KEGIA TAN	TARGET BULAN KE-												PERUBAHAN ANGGARAN (Rp) TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
				TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatn ya kualitas pelayanan publik dan akuntabilita s kinerja perangkat daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi	78,25	-	-	-	78, 25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		82							82						23.105.075.321,00	SEKRETARIAT
								Meningkatkan Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah			86,80											86,80		7.137.022.925,00	SEKRETARIAT
								Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	101	12	5	7	12	3	5	12	7	2	15	3	18	269.000.000,00	SEKRETARIAT
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	27	10	2	2	2	-	2	2	4	-	2	-	1	143.000.000,00	SEKRETARIAT
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	74	2	3	5	10	3	3	10	3	2	13	3	17	126.000.000,00	SEKRETARIAT
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persentase Laporan Pertanggungjawa ban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persen	100%	7,14%	7,14%	14,29 %	7,14%	7,14%	14,29 %	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	22.836.075.321,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	95	95	95	190	95	95	190	95	95	95	95	95	95	22.836.075.321,00	SEKRETARIAT
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Kapasitas ASN BPKPD	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Persen	100%	-	-	25,35 %	48,59 %	-	-	25,00 %	-	-	1,06%	-	-	447.340.000,00	SEKRETARIAT
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Menyediakan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	84.190.000,00	SEKRETARIAT

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Bimbingan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	142	-	-	1	138	-	-	-	-	-	3	-	-	363.150.000,00	SEKRETARIAT
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100%	0,00%	0,00%	50,00 %	0,00%	0,00%	16,67 %	0,00%	0,00%	16,67 %	0,00%	0,00%	16,66 %	2.331.716.225,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	49.999.500,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	640.084.800,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	59.997.500,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	115.200.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.169.400,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	70.000.000,00	SEKRETARIAT
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	180.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	388.165.025,00	SEKRETARIAT
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Melaksanakan penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.100.000,00	SEKRETARIAT
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Persen	100%	-	-	86,05 %	-	-	-	5,81%	-	-	-	8,14%	-	914.731.400,00	SEKRETARIAT

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

								Pengadaan Mebel	Menyediakan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.690.000,00	SEKRETARIAT
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menyediakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di sediakan	Unit	43	-	-	31	-	-	-	5	-	-	-	7	-	833.041.400,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	38,89 %	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	1.690.670.500,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	993.270.500,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000.000,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	634.400.000,00	SEKRETARIAT
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	5,56%	5,56%	9,11%	5,56%	5,56%	13,72 %	5,56%	5,55%	9,90%	5,55%	5,55%	22,82 %	1.752.564.800,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melaksanakan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	902.230.000,00	SEKRETARIAT	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	253	-	-	27	-	-	62	-	-	33	-	-	131	460.440.000,00	SEKRETARIAT
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	389.894.800,00	SEKRETARIAT

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

	2	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	12,04%	17,59%	17,59%	52,78%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100%	9,10%	8,00%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00%	0,00%	36,36%	3,37%	0,00%	18,18%	18,18%	701.974.550.548,00	
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persen	100%	9,10%	8,00%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00%	0,00%	36,36%	3,37%	0,00%	18,18%	18,18%	2.415.072.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62.450.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62.450.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	60.042.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	57.450.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.500.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	66.440.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	234.200.000,00	BIDANG ANGGARAN

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	228.290.000,00	BIDANG ANGGARAN	
								Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	613.980.000,00	BIDANG ANGGARAN	
								Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	607.394.000,00	BIDANG ANGGARAN	
								Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	318	-	200	-	-	-	-	-	-	118	-	-	-	349.876.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	100%	10,41 %	16,67 %	4,17%	10,41 %	16,67 %	4,17%	10,41 %	4,17%	4,17%	10,41 %	4,17%	4,17%	492.461.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
								Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Melaksanakan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	236	59	-	-	59	-	-	59	-	-	59	-	-	52.050.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
								Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	181.200.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN	
								Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	119.211.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN	

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	140.000.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koodinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	100%	0,00%	6,61%	6,61%	3,69%	6,61%	1,85%	4,64%	1,84%	29,84 %	17,66 %	16,13 %	4,52%	745.500.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
								Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	16	-	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	4	143.930.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
								Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	15		1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	109.900.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
								Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Laporan	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	132.000.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
								Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	152.150.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
								Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Menyusun Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	66.550.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

								Pemerintah Daerah		pemerintah daerah															
								Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	123	-	-	-	-	-	-	118	5	-	-	90.000.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
								Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	50.970.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
								Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Menyelenggarakan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,77%	2,77%	69,44 %	698.321.517.548,00	BIDANG PERBENDAHARAA N	
								Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	652.316.034.000,00	BIDANG PERBENDAHARAA N	
								Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Melaksanakan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.575.145.097,00	BIDANG PERBENDAHARAA N	
								Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.430.338.451,00	BIDANG PERBENDAHARAA N	
Mewujudka n pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	3	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	86%	-	-	-	86 %	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Persen	86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,00 %	956.852.100,00	BIDANG ASET DAERAH	
								Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100%	2,08%	2,08%	27,10 %	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	14,60 %	2,08%	39,58 %	956.852.100,00	BIDANG ASET DAERAH	
								Penyusunan Standar Harga	Menyusun Standar Harga Tahun 2026 dan Standar Harga Perubahan Tahun 2024	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	131.267.000,00	BIDANG ASET DAERAH	
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	31.735.100,00	BIDANG ASET DAERAH

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

								Pengamanan Barang Milik Daerah	Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Laporan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	539.850.000,00	BIDANG ASET DAERAH		
								Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Melaksanakan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	254.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH		
Meningkatn ya pertumbuha n pajak daerah	4	Persentase Pertumbuha n Pajak Daerah	5,18%	-	-	-	5,1 8%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100%	3,93%	3,16%	5,46%	11,11 %	5,46%	2,78%	11,11 %	2,78%	27,78 %	2,78%	5,46%	18,19 %	4.525.061.000,00		
								Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100,00 %	3,93%	3,16%	5,46%	11,11 %	5,46%	2,78%	11,11 %	2,78%	27,78 %	2,78%	5,46%	18,19 %	4.525.061.000,00		
								Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Menyusun Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	284.671.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	
								Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Melaksanakan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	584.655.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	106.495.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	29	3	1	7	-	7	-	-	-	-	-	7	4	1.931.000.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah	
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	Laporan	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	75.580.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Melaksanakan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	512.550.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah	

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2024

								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43.256.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
								Penagihan Pajak Daerah	Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	830.970.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Melaksanakan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	155.884.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Aksi Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 serta dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.

Perubahan Rencana aksi didasari dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan perubahan pengalokasian anggaran khususnya dalam pengalokasian belanja modal dan belanja honorarium serta terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran dan perubahan dalam indikator sub kegiatan. Perubahan rencana aksi BPKPD tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan dari pagu anggaran Rp. 737.703.200.417,00 menjadi sebesar Rp. 737.698.561.894,00 pada perubahan Anggaran. Perubahan anggaran ini berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BPKPD Tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul.

Dengan tersusunnya perubahan rencana aksi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Tasikmalaya, Oktober 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. PONTA A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003